

## Sosialisasi Pemuda Sadar Pemilu di Kabupaten Buton Selatan

Mahyudin Mahyudin\*, L.M. Azhar Sa'ban, Rendi Priono, Rahmat Ramadhan, Anton Anton

Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

[mahyuddinfaith2018@gmail.com](mailto:mahyuddinfaith2018@gmail.com)\*

### Abstrak

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki tugas untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan bangsa, terutama untuk terus membangun negara yang lebih maju dan bermartabat sehingga akan selalu dihargai oleh semua pihak. Pentingnya peran pemuda dalam sebuah negara menjadikan pemuda sebagai agen perubahan sosial dalam segala bidang yang memainkan peranan penting dan signifikan bagi kemajuan sebuah negara. Pemuda sebagai agen perubahan harus dapat mengendalikan proses transisi demokrasi menuju arah yang lebih baik yaitu dapat mengawal terlaksananya proses politik secara adil. Untuk mengawal proses politik tersebut pemuda dapat berpartisipasi baik sebagai penyelenggara, peserta kegiatan maupun pengawas jalannya proses politik. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan motivasi dan dukungan kepada pemuda-pemudi di Buton Selatan untuk lebih aktif dan partisipatif dalam proses politik, khususnya dalam pelaksanaan Pemilu. Kegiatan PKM berupa sosialisasi pendidikan politik untuk pemuda di Buton Selatan dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Hasil dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan sosialisasi ini ialah mampu memupuk kesadaran awal pemuda-pemudi untuk mulai aktif dalam proses politik seperti menggunakan hak suaranya, menjadi pengawas ketika Pemilu dilangsungkan serta mampu memberikan motivasi bagi pemuda-pemudi untuk terjun langsung sebagai Tim Sukses dalam mendukung calon pasangan yang memiliki visi-misi sesuai dengan pandangan mereka.

**Kata Kunci:** Pemilu, sosialisasi, Pemuda,

### PENDAHULUAN

Para pemuda berkumpul dan bersumpah bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu. Hal itu dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia (Hadiwardoyo, 1995). Bersarnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh keterlibatan para pemuda. Sejarah mencatat, bahwa pemuda memiliki peran sangat penting dalam setiap perubahan yang terjadi di negeri ini. Banyak sekali peristiwa sejarah kemerdekaan hingga sekarang. Sumpah pemuda pada 1928 adalah bukti satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia (Sudaryanto, 2018).

Negara demokrasi menempatkan pemuda sebagai subjek dari pemerintahan, semakin tinggi partisipasi pemuda akan semakin baik kualitas demokrasi di negara tersebut. Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat (Amir, 2020). Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara (Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin, 2018). Ciri mendasar negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi warga negara untuk mewujudkan keinginan politik rakyat dalam memilih calon pemimpin yang pantas menduduki jabatan atas amanat yang diberikan (Hatta Abdi Muhammad<sup>1</sup>, Nopyandri<sup>2</sup>, Ujang Babas<sup>3</sup>, 2020)

### Saran Pengutipan:

Mahyudin, M., Sa'ban, L. A., Priono, R., Ramadhan, R., & Anton, A. (2022). Sosialisasi Pemuda Sadar Pemilu Di Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(3). <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i3.362>

Salah satu faktor pendukung Pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat, jumlah partisipasi yang banyak akan menunjukkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilu (Muhaling, 2013). Meskipun jika pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat rendah tidak dapat membatalkan hasil Pemilu, namun hal ini dapat menunjukkan kesadaran politik masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu daerah (Arniti, 2020). Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilihan Umum (Hemafitria et al., 2021). Dalam hal ini, warga negara berperan penting dalam menseleksi pejabat-pejabat negara yang nantinya akan mengatur pemerintahan maupun tindakan-tindakan yang akan mereka ambil nantinya.

Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih (Subiyanto, 2020). Upaya meningkatkan partisipasi, pemahaman dan kesadaran berpolitik dapat dilakukan berbagai pihak, baik dari penyelenggara pemilu, peserta politik, maupun kalangan akademisi terutama dari perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Abdi Muhammad, Nopyandri, & Babas, 2020). Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena golput ini ada di setiap pemilihan umum. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam meningkatkan partisipasi, pemahaman dan kesadaran berpolitik melalui pendidikan politik, yang menjadi isu penting untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Jika dilihat faktor penyebab seseorang tidak menggunakan hak pilihnya ada beberapa factor, antara lain:

- 1) Faktor teknis ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah, atau berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih.
- 2) Faktor politik faktor ini adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, ketidak percaya dengan partai. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Beredarnya berita negatif yang menerpa para wakil rakyat, yang notabene adalah para politisi, sedikit banyak berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap pemilu.
- 3) Faktor sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala dusun, memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Sehingga menuntut penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta seluruh *stakeholder* untuk terus selalu menyebarluaskan informasi seputar pemilu secara massif.
- 4) Faktor administrasi adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang terkadang membuat pemilih tidak ikut dalam pemilihan.

Pemuda juga bisa ikut serta mengawasi proses pemilu di TPS. Kecurangan pemilu bisa juga terjadi saat di TPS. Pemuda bisa ikut memastikan bahwa tidak ada kecurangan di TPS seperti kecurangan perhitungan suara. Jadi bisa dikatakan, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Bawaslu membutuhkan bantuan pemuda untuk ikut serta berpartisipasi dalam mengawal jalannya pemilu 2024. Pemuda sebagai agen perubahan harus dapat mengendalikan proses transisi demokrasi menuju arah yang lebih baik yaitu dapat mengawal terlaksananya proses politik secara adil. Untuk mengawal proses politik tersebut pemuda dapat

berpartisipasi baik sebagai penyelenggara, peserta kegiatan maupun pengawas jalannya proses politik (Lestari et al., 2019).

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan motivasi dan dukungan kepada pemuda-pemudi di Buton Selatan untuk lebih aktif dan partisipatif dalam proses politik, khususnya dalam pelaksanaan Pemilu

## **METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN**

Kegiatan PKM berupa sosialisasi pendidikan politik untuk pemuda di Buton Selatan dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada tanggal 5 September Tahun 2022. Adapun lokasi kegiatan PKM ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Buton Selatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pentingnya Partisipasi Politik**

Materi yang disampaikan berupa sudut pandang tentang partisipasi formal dan informal. Tujuan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman pentingnya partisipasi politik. *Pars* artinya bagian dan *capere* berarti mengambil atau ikut serta. Jadi, partisipasi secara bahasa diartikan keikutsertaan mengambil peran sebagai unsur dalam politik. Lalu, dalam bahasa Inggris disebut *participation* berarti mengambil peranan. Partisipasi politik adalah keterlibatan individu pada berbagai macam tingkatan berpolitik.

Partisipasi politik terbagi dua, yaitu: 1) partisipasi politik konvensional, adalah pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi; dan 2) partisipasi politik non-konvensional, adalah pengajuan petisi demonstrasi, konfrontasi mogok, sampai partisipasi yang lebih ekstrem seperti tindakan terhadap harta benda dan tindakan kekerasan terhadap manusia.

Pemateri menyampaikan, partisipasi merupakan hal yang esensial dalam negara demokrasi. Oleh karena itu untuk mewujudkan partisipasi politik, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan:

- 1) Harus ada kompetisi dalam arti jabatan-jabatan public harus dikompetisikan.
- 2) Partisipasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- 3) Kebebasan berpendapat, dalam hal ini pemerintah tidak boleh menghalang-halangi gerakan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi masyarakat.

Dengan demikian, partisipasi memiliki peranan yang penting, baik bagi setiap individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat, maupun bagi pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi di suatu negara.

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki tugas untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan bangsa, terutama untuk terus membangun negara bangsa yang lebih maju dan bermartabat sehingga akan selalu dihargai oleh semua pihak. Pentingnya peran pemuda dalam sebuah negara menjadikan pemuda sebagai agen perubahan sosial dalam segala bidang yang memainkan peranan penting dan signifikan bagi kemajuan sebuah negara.



Gambar 1. Sosialisasi Tim PKM dengan Pemuda

Peran pemuda secara khusus dalam proses politik ialah:

- 1) Pemuda sebagai agen perubahan harus dapat mengendalikan proses transisi demokrasi menuju arah yang lebih baik yaitu dapat mengawal terlaksananya proses politik secara adil. Untuk mengawal proses politik tersebut pemuda dapat berpartisipasi baik sebagai penyelenggara, peserta kegiatan maupun pengawas jalannya proses politik.
- 2) Pemuda agen penjaga moral dan etika politik dalam proses demokrasi, yaitu proses politik harus dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sikap dan perilaku politik yang dijalankan harus menjunjung tinggi etika dan sopan santun politik sehingga tidak menerapkan praktik-praktik politik yang kotor, menghalalkan segala cara, ataupun menggunakan cara- cara kekerasan/premanisme politik.
- 3) Pemuda berperan sebagai penjaga demokrasi, menghormati hak dan kewajiban orang lain, menghargai adanya perbedaan pilihan, dan tidak terjebak pada pragmatisme politik sesaat saja.

Terwujudnya peran pemuda secara efektif dan efisien bagi keberlangsungan penyelenggaraan negara maka pemuda harus memiliki beberapa sikap, yaitu:

- 1) Komitmen. Pemuda harus memiliki komitmen yang kuat, keteguhan hati, dan konsistensi memperjuangkan serta mewujudkan cita-cita bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara.
- 2) Integritas. Pemuda harus dapat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang dapat dirasakan dan dilihat dari sikap dan perilaku yang santun dalam berpolitik. Integritas diri merupakan investasi jangka panjang yang harus dijaga sebagai rahmat kebijaksanaan.
- 3) Kompetensi. Pemuda harus memiliki kemampuan dan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar yang harus dikembangkan dan ditingkatkan secara berkala. Kemampuan untuk memahami orang lain, mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan, mencari solusi merupakan proses pembelajaran dan pendewasaan yang harus terus menerus dikembangkan.
- 4) Konstituensi. Pemuda harus memiliki konstituensi yang meliputi dukungan dan jaringan dari sebanyak-banyaknya masyarakat untuk menjalin hubungan baik serta membina jaringan yang telah terbangun merupakan pekerjaan yang tidak boleh diabaikan dalam berkiprah sebagai pemuda. Kepercayaan dan upaya untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara elegan seperti mempraktikkan seni pemerintahan, yaitu seni mempengaruhi orang lain untuk menciptakan hal-hal yang lebih positif.

Pentingnya peran dan partisipasi pemilih sangat mewarnai dinamika pilkada, dengan demikian jumlah pemilih cukup mempengaruhi, sehingga perlunya kesadaran bagi pemilih dengan memanfaatkan hak memilih mereka dengan sebaik-baiknya. Karena satu suara dari mereka sangat berharga.

Pemilih harus bisa mengetahui tentang ilmu politik dengan mengikuti sosialisasi, bisa mencari informasi terkait bidang politik, mengetahui visi, misi, dan program peserta pemilu dengan cermat hal ini akan menentukan arah politik pemilih dalam menentukan pilihan politiknya, mengenali riwayat calon dan partai politik, pemilih pemuda harus bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria pemimpin yang baik, serta pemilih pemuda harus bertanggungjawab untuk memilih pemimpin yang baik sebagai generasi penerus bangsa. Dengan pengetahuan tersebut pemilih akan menjadi cahaya dari politik di Indonesia, karena adanya kesadaran diri untuk membentuk politik Indonesia yang baik.

Penyelenggaraan Sosialisasi Pentingnya partisipasi politik ini sangat berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar turut andil dalam melaksanakan Hak dan Kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu agar tidak termasuk dalam golput. Agar hal tersebut dapat terwujud, maka kesadaran akan pentingnya pelaksanaan Pemilu harus dimiliki oleh para pemuda sebagai pemilih agar mampu melaksanakan dan menggunakan suara yang mereka miliki dengan sebaik mungkin.

### **Partisipasi Pemuda dalam Pengawasan Pemilu**

Materi sosialisasi selanjutnya tentang partisipasi pemuda dalam pengawasan Pemilu. Pemilu serentak 2024 bukan hanya menjadi pekerjaan rumah penyelenggara pemilu, tapi juga menjadi pekerjaan rumah seluruh rakyat Indonesia, termasuk generasi pemuda yang cerdas dan kritis, yang mendambakan pemimpin yang jujur dan amanah, mampu membawa pada kemajuan. Pengawasan partisipatif menjadi momok penting untuk mendukung terlaksananya pemilu yang bersih, berintegritas, dan minim kecurangan.

Generasi muda generasi milenial harus mampu menebar energi positif, menebarkan virus-virus kebaikan, khususnya dalam hal pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif. Pengawasan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara pemilu saja, tetapi menjadi tugas kita semua, termasuk generasi milenial.

Peran pemuda sangat penting di era reformasi dan era berdemokrasi sekarang. Itu sebabnya menjadi penting bagi para pemuda mengikuti pendidikan politik, agar para pemuda bisa ikut mendukung menguatnya proses demokratisasi di negara ini. Melihat pada tiap-tiap mekanisme demokrasi Pemilu memiliki konsekuensi, untuk itu sebagai generasi muda memiliki peran vital dalam mengawal proses demokrasi kedepan, agar hasil Pemilu yang diperoleh tetap terjaga kualitasnya.

Salah satu tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Perintah undang-undang pemilu ini tentu sangat beralasan sebab kesuksesan pemilu tidak hanya pada tangan penyelenggara pemilu, namun semua komponen masyarakat yang terlibat aktif pada seluruh tahapan pemilu. Sejak gong pemilu ditabuh, maka masyarakat idealnya ambil bagian secara langsung.

Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu bagi lembaga Bawaslu merupakan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kepemiluan dan meningkatkan partisipasi politik dalam semua segmen pemilih. Mengorganisir gerakan pengawas partisipatif dilakukan oleh Bawaslu dengan menyertakan semua pemangku kepentingan, termasuk para pemuda.

Banyak hal dalam tahapan pemilu yang amat penting diawasi. Misalkan saja pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Pada tahapan ini, pengawas harus memastikan bahwa warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar namanya sebagai pemilih. Lalu ada tahapan pencalonan yang membutuhkan pengawas untuk memastikan kesesuaian profil para calon/caleg yang menjadi peserta pemilu. Belum lagi masa kampanye yang amat membutuhkan pengawasan langsung dari publik terkait materi-materi kampanye dari peserta pemilu. Lalu ada tahapan penentuan bernama pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yang penting disadari bagi pemuda untuk tidak hanya berpartisipasi memilih tapi juga menjadi pengawas pemilu, karena pemilu Indonesia punnya TPS yang amat banyak. Dari semua tahapan, jika

ada laporan dari masyarakat umum atau temuan dari pengawasan partisipatif, Bawaslu akan melakukan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat terutama kaum muda dalam mengawal pesta demokrasi lima tahunan Pemilu Serentak 2024 mendatang adalah sebuah harapan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat. Sumpah Pemuda mengingatkan kita bahwa para pemuda merupakan subjek yang aktif serta punya peran dan pengaruh amat penting dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ini semua perlu dilanjutkan bagi para pemuda dalam Pemilu Serentak 2024 untuk tidak hanya menjadi penonton dalam pesta demokrasi, atau tidak hanya memilih, tetapi turut serta dalam pengawasan partisipatif. Tentu hal ini bertujuan menciptakan pemilu berkualitas.

## KESIMPULAN

Kurangnya kepedulian dan kesadaran pemuda-pemudi untuk aktif dan ikut serta memberikan pendapat dan masukan mereka kepada persoalan-persoalan politik hingga tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum akan menimbulkan persoalan yang menantang bagi keseimbangan sistem pemerintahan sebuah daerah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disimpulkan beberapa poin, yaitu: Pengetahuan dan wawasan pemuda-pemudi di Kabupaten Buton Selatan mengenai pentingnya peran mereka dalam proses politik khususnya proses Pemilu semakin meningkat. Penguasaan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses politik khususnya proses Pemilu semakin terasah dan terarah karena telah disimulasikan melalui berbagai bentuk dari praktik-praktik yang telah dicontohkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ini sangat memberikan manfaat dan kontribusi yang besar bagi pemuda-pemudi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. (2020). Kesenjangan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115–131. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Hadiwardoyo, A. P. (1995). 1332-3197-1-SM.pdf. In *Orientasi Baru* (pp. 117–125).
- Hatta Abdi Muhammad1, Nopyandri2, Ujang Babas3. (2020). Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Siswa Sekolah Pinggiran Kota Jambi Dalam Menghadapi Pilkada Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020. *Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 19. <http://journal.umuslim.ac.id/index.php/pkm/article/view/77>
- Hemafitria, H., Novianty, F. N. F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>
- Lestari, Y. S., Juraida, I., Triyanto, T., & Effida, D. Q. (2019). Sosialisasi Peran Pemuda-Pemudi dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Nagan Raya Tahun 2019. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.35308/baktiku.v1i1.1233>
- Muhaling, A. (2013). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro*.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28.
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi

Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>

Sudaryanto. (2018). Dari Sumpah Pemuda (1928) Sampai Kongres Bahasa Indonesia I (1938): Kajian Linguistik Historis Sekitar Masa-Masa Prakemerdekaan. *Kajian Linguistik Dan Sastra*, 3(2), 100–108.